

ABSTRAK

INTEGRASI SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA DAN SISTEM PELAPORAN KEUANGAN INSTANSI PEMERINTAH (Studi Kasus KPPN Malang)

Oleh:

Muhammad Nur

M. Khoiru Rusydi, S.E., Ak., M.Ak., BKP

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya

E-mail : en.nur.m@gmail.com

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kemungkinan membuat rancangan sistem yang terintegrasi pada pelaporan akuntabilitas kinerja dan pelaporan keuangan instansi pemerintah, dengan objek penelitian Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Malang. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif.

Penelitian ini menghasilkan kesimpulan bahwa pelaporan kinerja instansi pemerintah masih belum berjalan dengan optimal. LAKIP yang seharusnya digunakan sebagai salah satu dokumen penilaian kinerja instansi pemerintah ternyata masih sebatas formalitas dan belum memberikan umpan balik yang berarti kepada instansi yang bersangkutan. Hal ini berbanding terbalik dengan pelaporan keuangan yang telah dibuat melalui sistem yang terkomputerisasi sehingga menghasilkan laporan yang lebih akurat untuk dijadikan dasar perencanaan tahun anggaran berikutnya. Dengan demikian diperlukan suatu sistem yang terintegrasi sesuai amanat peraturan perundang-undangan dengan tujuan untuk memperbaiki sistem pelaporan kinerja dan pelaporan keuangan instansi pemerintah.

Kata Kunci : akuntabilitas kinerja, pelaporan keuangan, LAKIP, Laporan Keuangan, integrasi sistem

ABSTRACT**THE INTEGRATION OF PERFORMANCE ACCOUNTABILITY SYSTEM AND
FINANCIAL REPORTING SYSTEM IN GOVERNMENTAL AGENCY
(A CASE STUDY AT KPPN MALANG)**

By:

Muhammad Nur*E-mail : en.nur.m@gmail.com*

Supervisor:

M. Khoiru Rusydi, S.E., M.Ak.Ak., BKP

The research aims at discovering the possibility of an integrated system draft of performance accountability reporting and financial reporting in governmental agency in which the object of the research is State Treasury Office (Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara) Malang. The method used in the research is qualitative descriptive method.

It is concluded that the performance reporting of governmental agency has not run optimally. The Government Performance Reports (LAKIP) which had to be used as one of performance assessments documents of governmental agency was in a more formality and had not contribute a significant feedback to the agency concerned. It was inversely proportional to financial reporting made by using computerized system to produce report in accurate figure as a principle of the following financial year. Therefore, what is required was an integrated system corresponding to the mandate of the legislation to improve the systems of performance reporting and financial reporting of governmental agency.

Keywords: performance accountability, financial reporting, performance report, financial statement, system integration

**INTEGRASI SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA
DAN SISTEM PELAPORAN KEUANGAN INSTANSI PEMERINTAH
(Studi Kasus KPPN Malang)**

I. PENDAHULUAN

Pengembangan sistem pelaporan dan pertanggungjawaban instansi pemerintah telah dimulai sejak tahun 1998, dengan diterbitkannya TAP MPR RI Nomor XI/MPR/1998 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme. Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) merupakan amanat dari Instruksi Presiden Republik Indonesia (Inpres) Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP). Dalam Inpres tersebut dijelaskan bahwa setiap instansi pemerintah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan untuk dapat mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya, serta kewenangan pengelolaan sumber daya dengan didasarkan suatu perencanaan strategi yang ditetapkan oleh masing-masing instansi. Sementara itu di sisi lain, sebagai bentuk akuntabilitas dan transparansi pelaksanaan anggaran instansi yang bersangkutan dibuatlah suatu sistem pelaporan keuangan instansi pemerintah yang diamanatkan dalam Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/2007 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat, yang telah diperbarui dengan PMK Nomor 233/PMK.05/2011.

Pada masa sekarang ini, instansi pemerintah cenderung menilai keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatannya hanya berdasarkan pada kemampuan instansi tersebut dalam menyerap/ merealisasikan anggarannya. Dengan kata lain, instansi tersebut hanya menekankan pada aspek *input* tanpa melihat *output* maupun *outcome* dari program dan kegiatannya (Supartini, 2012). Hal ini mengindikasikan bahwa instansi pemerintah sepertinya cenderung lebih mementingkan pelaporannya dibandingkan dengan pelaporan kinerjanya, walaupun kedua sistem pelaporan ini sama pentingnya. Hal ini juga dapat dilihat dari munculnya fenomena Kementerian/ Lembaga dan Pemerintah Daerah yang mengejar opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangannya sementara masih saja terungkap bahwa di instansi tersebut tetap berlangsung berbagai praktik KKN (Supeno, 2011; Arfianti, 2011; Siregar, 2012; Setiawan, 2012; <http://makassar.antaranews.com> edisi 12 Oktober 2012; <http://www.jawapos.co.id> edisi 29 Desember 2012). Masalah lainnya adalah instansi pemerintah yang mendapatkan opini WTP tersebut tidak selalu bisa menunjukkan perbaikan kinerjanya. Sebagai contoh, instansi yang realisasi anggarannya 100% tidak selalu bisa dikatakan telah melaksanakan pekerjaannya dengan efektif dan efisien dibandingkan dengan instansi yang hanya merealisasikan anggarannya 90% saja (Mahmudi, 2010). Hal ini tentu saja menunjukkan bahwa sistem pelaporan kinerja instansi pemerintah tersebut tidak berjalan dengan optimal.

Beberapa permasalahan lain yang muncul dalam pertanggungjawaban pelaksanaan program dan kegiatan instansi pemerintah antara lain (Susilo, 2010 dalam Supartini, 2012) antara lain :

- a) Implementasi SAKIP dan LAKIP hanya sebatas pemenuhan kewajiban formal dan tidak menyentuh substansi.
- b) LAKIP masih belum dimanfaatkan secara optimal bagi pengambilan keputusan organisasi dan peningkatan kualitas pelayanan publik.
- c) Penyusunan LAKIP masih dianggap oleh sebagian pihak sebagai tambahan beban pekerjaan.
- d) Anggaran belanja instansi pemerintah tidak digunakan sebagai media untuk mencapai target, akan tetapi hanya untuk dihabiskan.
- e) Penyusunan program dan kegiatan instansi pemerintah masih belum tepat sasaran dan tidak relevan dengan kondisi perekonomian saat ini.
- f) Pertanggungjawaban kinerja kegiatan masih sebatas pada penyerapan dana.

Dengan semakin terbukanya informasi publik pada masa sekarang ini, maka masyarakat diharapkan juga dapat berperan aktif dalam menyampaikan aspirasi dan keluhannya pada kualitas pelayanan publik. Banyaknya komentar masyarakat tentang keberhasilan instansi pemerintah dalam menjalankan amanah yang diberikan kepadanya menunjukkan harapan dan kepedulian publik yang harus direspon. Akan tetapi masih terdapat perbedaan harapan (*expectation gap*) antara harapan masyarakat terhadap kinerja instansi pemerintah dengan apa yang dilakukan oleh para pengelola dan pejabat pemerintahan sering berbeda (Mahsun, 2006). Pada era reformasi saat ini, fenomena pengukuran keberhasilan yang hanya menekankan pada *input* seperti di atas banyak mendapat sorotan tajam dari berbagai pihak. Oleh karena itu dipertimbangkan untuk memperbaiki indikator keberhasilan suatu instansi pemerintah agar lebih mencerminkan kinerja instansi pemerintah yang sesungguhnya.

Cavaluzzo & Ittner (2003) menyatakan bahwa pengembangan ukuran-ukuran kinerja harus disertai dengan peningkatan akuntabilitas pelaporan, sehingga berpengaruh pada peningkatan kinerja internal dan pengambilan keputusan yang berkualitas. Dengan demikian diperlukan suatu sistem yang sederhana dan mudah diterapkan, agar diperoleh manfaat bagi publik dalam upaya keikutsertaan publik untuk menilai/ mengevaluasi kinerja dan program-program pemerintah. Powers (2009) juga menyatakan bahwa sistem pengukuran kinerja harus terkait dengan sistem perencanaan dan manajemen, sistem evaluasi, dan sistem pemeriksaan (audit). Menurut Pamungkas & Yusuf (2007), pelaksanaan sistem yang baik dan konsisten akan berdampak pada pengurangan resiko kebocoran anggaran dan sistem akuntansi pemerintah merupakan aspek pendukung pertanggungjawaban pelaksanaan tugas utama instansi pemerintah, terutama yang berkaitan dengan aspek keuangan. Di sisi lain, penyajian laporan keuangan yang relevan (tepat waktu dan lengkap) dan andal (dapat diverifikasi) masih belum terlalu berimbas pada perbaikan kualitas pelayanan publik. Hal ini antara lain disebabkan karena sistem informasi yang

digunakan oleh instansi pemerintah masih belum menyediakan informasi yang relevan dan andal bagi pengambilan keputusan organisasi pemerintahan. Integrasi sistem informasi akan memberikan berbagai keuntungan seperti efisiensi, efektivitas, dan aksesibilitas (Nasrun, *et. al.*, 2012). Sementara itu, dukungan integrasi sistem ini telah ada, baik dari sisi teknologi, sumber daya manusia, maupun dana. Dengan berbagai dukungan tersebut maka proses pengintegrasian sistem akuntabilitas kinerja dan sistem pelaporan keuangan sudah seharusnya bisa segera dilaksanakan.

Pengintegrasian pelaporan kinerja dan pelaporan keuangan sendiri sudah diamanatkan dalam Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Dalam paragraph penjelasan UU 17/2003 tersebut diterangkan bahwa:

“... dalam proses penyusunan dan penetapan anggaran kementerian negara/lembaga/perangkat daerah, perlu dilakukan penyatuan sistem akuntabilitas kinerja dalam sistem penganggaran,”

Selain itu, pasal 20 ayat (2) Peraturan Pemerintah RI Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah juga telah mengamanatkan pengintegrasian tersebut, yaitu bahwa:

“Sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikembangkan secara terintegrasi dengan sistem perencanaan, sistem penganggaran, sistem perbendaharaan, dan Sistem Akuntansi Pemerintahan.”

Jika ditelaah lebih lanjut, pemberlakuan integrasi sistem akuntabilitas kinerja dan sistem pelaporan keuangan instansi pemerintah seharusnya sudah dilakukan sejak lama sesuai amanat kedua peraturan perundang-undangan di atas. Akan tetapi pada kenyataannya (berdasarkan data dan hasil wawancara penulis dengan para narasumber) kedua sistem tersebut masih berjalan terpisah. LAKIP sebagai produk utama dari SAKIP masih disusun secara manual sedangkan Laporan Keuangan sebagai produk SAPP telah menggunakan aplikasi komputer sejak tahun 2007-an. Dengan demikian maka terdapat kesulitan dalam proses pengintegrasian kedua sistem tersebut. Akan tetapi, permasalahan selanjutnya yang perlu dipertanyakan adalah dimana letak kendala utama yang menyebabkan kesulitan dalam proses integrasi tersebut, apakah pada sistem informasi komputer (kesulitan dalam mengintegrasikan dan mengkoneksikan *database*) atau pada sumber daya manusia (misal pada faktor kebijakan yang melibatkan banyak pihak) atau pada faktor lainnya.

Maka dengan berdasarkan pada uraian dan berbagai permasalahan di atas, mendorong penulis untuk meneliti lebih lanjut apakah perlu segera dilakukan pengintegrasian sistem akuntabilitas kinerja dan sistem pelaporan keuangan instansi pemerintah dan sejauh mana proses pengintegrasian tersebut dapat dilaksanakan. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk mencari letak kendala utama dari kesulitan pengintegrasian kedua sistem tersebut sehingga sampai sekarang masih belum terlaksana dengan optimal. Harapannya adalah penelitian ini dapat menjadi salah satu solusi alternatif atas

perbaikan fungsi LAKIP dan Laporan Keuangan bagi peningkatan kualitas pelayanan instansi pemerintah pusat dan daerah berdasarkan pada evaluasi yang komprehensif pada kedua laporan tersebut (LAKIP dan laporan keuangan).

Rumusan Masalah

Beberapa kelemahan dari sistem pelaporan kinerja dan sistem pelaporan keuangan yang terpisah seperti yang telah penulis jelaskan di atas menjadikan dasar bagi penulis untuk membuat salah satu solusi alternatif dalam penilaian kinerja dan keuangan yang terintegrasi bagi instansi pemerintah. Integrasi sistem akuntabilitas kinerja dengan sistem penganggaran/ pelaporan keuangan juga telah diamanatkan dalam UU No.17/2003 dan PP No.8/2006. Penjelasan PP 8/2006 juga mengakui belum terintegrasinya LAKIP dengan laporan keuangan sehingga diperlukan penyusunan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (SAKIP) yang terintegrasi dengan sistem perencanaan strategis, sistem penganggaran, sistem akuntansi pemerintahan (SAP), dan sistem perbendaharaan. Sementara itu, dalam rentang waktu yang cukup lama (2006 s.d. 2013), pengintegrasian kedua sistem pelaporan tersebut belum juga diimplementasikan. Dengan demikian perlu dilakukan penelitian lebih mendalam mengapa pengintegrasian kedua sistem tersebut sepertinya sangat sulit diterapkan. Selain itu, perlu juga dibuat rancangan prosedur teknis pengintegrasian sistem akuntabilitas kinerja dan sistem pelaporan keuangan instansi pemerintah. Tujuan dari rancangan ini adalah sebagai salah satu solusi alternatif dalam menyelesaikan masalah dan kendala yang muncul dalam proses pengintegrasian yang memakan waktu sangat lama dan sampai saat ini belum dilaksanakan oleh pemerintah.

Penelitian Terdahulu

Penelitian sejenis yang terkait dengan permasalahan pelaporan kinerja dan pentingnya pengintegrasian sistem pelaporan kinerja dan sistem pelaporan keuangan telah dilakukan oleh beberapa peneliti. Cavaluzzo dan Ittner (2003) menyatakan bahwa pengembangan ukuran-ukuran kinerja saja tanpa meningkatkan akuntabilitas pelaporan hanya akan berfungsi simbolis, tanpa ada pengaruhnya pada perbaikan kinerja dan pengambilan keputusan organisasi. Widodo (2010) menjelaskan bahwa indikator-indikator dalam LAKIP tidak terlalu berhasil dalam menilai/ mengevaluasi keberhasilan program dan kebijakan pemerintah. Astuti (2011) mengungkapkan bahwa LAKIP dapat mendorong pemerintah menciptakan *good governance*, memberikan masukan kepada pihak-pihak yang berkepentingan (stakeholders) dengan pemerintah, serta meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada pemerintah dengan terwujudnya akuntabilitas kinerja. Namun demikian, pada kenyataannya kemampuan sistem pengukuran kinerja untuk meningkatkan kinerja, dan mewujudkan *good governance* masih sering dipertanyakan dan diperdebatkan. Pamungkas (2012) menyimpulkan bahwa dukungan kualitas Laporan Keuangan pemerintah daerah sebagai faktor yang relatif dominan dalam menegakkan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, selain dukungan penerapan akuntansi publik dan peran pengawasan dari pusat. Supartini (2012) juga

menyatakan bahwa dalam evaluasi kinerja diperlukan pula analisis efisiensi (membandingkan antara output dan input baik untuk rencana maupun realisasi). Dengan kata lain bahwa untuk menilai kinerja tidak cukup hanya menilai indikator-indikator yang bersifat non-keuangan saja tanpa memperhatikan aspek keuangan (anggaran/ dana).

Solikin (2006) menyatakan bahwa pengintegrasian Laporan Kinerja dan Laporan Keuangan merupakan hal yang sangat penting untuk dilaksanakan karena dengan penyusunan laporan yang terpisah, berasal dari sistem yang berbeda dan tidak terkait akan menyulitkan para penyusun laporan keuangan. Sementara itu, Nurkhamid (2008) menunjukkan bahwa masih terdapat masalah dalam implementasi sistem pengukuran kinerja di setiap organisasi pemerintahan. Permasalahan tersebut dapat muncul pada tahap pengembangan sistem pengukuran kinerja maupun pada tahap penggunaan hasil dari implementasi sistem pengukuran kinerja. Supeno (2011) menyatakan bahwa peran manajemen dalam transparansi organisasi pemerintah adalah sangat vital dalam proses perencanaan dan pengembangan kinerja mendatang melalui *restrospective performance appraisal* atas pengelolaan sistem akuntansi instansi (SAI) secara baik dan benar.

II. TINJAUAN PUSTAKA

Good Governance

Transparansi dan akuntabilitas bisa terwujud melalui media *good governance*. Akuntansi sektor publik menyediakan media ini. Mardiasmo (2003) menyatakan bahwa akuntabilitas publik meliputi berbagai bidang seperti hukum dan kejujuran, manjaerial, program, kebijakan, dan finansial. Dari tinjauan ini, maka dapat diperoleh pengertian bahwa harus ada keterkaitan pada berbagai akuntabilitas tersebut. Aspek finansial maupun non-finansial harus dipertimbangkan secara komprehensif agar tercipta akuntabilitas publik.

Tiga pilar utama dalam penerapan *good governance* menurut Osborne & Geabler (1992) dalam Zeyn (2011) adalah sebagai berikut :

- a. Transparansi, yaitu keterbukaan dalam manajemen pemerintah.
- b. Partisipasi, yaitu adanya keterlibatan berbagai elemen masyarakat dalam pengambilan keputusan yang berkaitan dengan kebijakan publik.
- c. Akuntabilitas, yaitu kewajiban untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan amanah yang diemban oleh instansi pemerintah.

New Public Management

New Public Management (NPM) pertama kali diperkenalkan oleh Chistoper Hood pada tahun 1991 (Mahmudi, 2010). NPM menekankan pada kontrol atas *output* kebijakan pemerintah, desentralisasi otoritas manajemen, pengenalan pada pasar dan mekanisme pasar, serta layanan yang berorientasi *customer* (warganegara). NPM berpendapat pemerintahan yang digerakkan oleh *customer-driven* menekankan akuntabilitas, inovasi, pilihan pada pelayanan, dan pengurangan pemborosan, karena itu lebih unggul dibanding pemerintahan birokratis. Senada dengan hal ini, Yuliani (2007) menyatakan bahwa konsep

New Public Service(NPS) juga berpandangan hampir serupa, akan tetapi menganggap bahwa masyarakat sebagai *citizen* (warga negara – yang mempunyai hak dan kewajiban yang sama), bukan sebagai *customer* (pelanggan – sebagai makhluk ekonomi yang lebih dilihat kepada kemampuan untuk membeli layanan). Mahmudi (2010) berpendapat bahwa NPM telah memberikan kontribusi positif pada perbaikan kinerja sektor publik melalui mekanisme pengukuran kinerja yang diorientasikan pada pengukuran ekonomi, efisiensi, dan efektivitas.

Balanced Scorecard (BSC) pada Institusi Sektor Publik

Manajemen atau pengelolaan keuangan negara seharusnya juga diarahkan pada keseimbangan antara aspek finansial dan non-finansial, seperti halnya dalam konsep *Balanced Scorecard*(BSC) yang dikemukakan oleh Kaplan & Norton (1992) dalam Kaplan (2010). BSC tidak hanya bisa digunakan sebagai alat pengukuran kinerja, tetapi juga sebagai sistem manajemen strategis perusahaan dalam menterjemahkan visi, misi, dan strategi menjadi sasaran strategis dan inisiatif strategis yang komprehensif, koheren, dan terukur (Mahmudi, 2010). Beberapa indikator yang biasa digunakan pada BSC seperti indikator *outcome* dan *output* yang jelas, indikator internal dan eksternal, indikator keuangan dan non-keuangan, dan indikator sebab-akibat.

Menurut Yuwono (2001), terdapat tiga hal yang merefleksikan bahwa BSC membuat organisasi menjadi fokus terhadap strategi, yaitu :

- a. Dengan BSC, maka akan ada hubungan antara penganggaran dengan strategi.
- b. Keberhasilan organisasi tidak bisa hanya dilihat dari angka-angka statistik. Keberhasilan ini juga harus dilihat dari aspek-aspek non-finansial lainnya.
- c. BSC akan menciptakan sistem umpan balik dan sistem analitik untuk mendapatkan data yang riil dan relevan bagi pengambilan keputusan.

Anggaran Berbasis Kinerja (*Performance Based Budgeting*)

Anggaran negara seharusnya disusun dengan memperhatikan alokasi sumber daya, penghematan, kebijakan pemerintah, pelaksanaan program, dan peningkatan pelayanan masyarakat. Ketiga paket undang-undang keuangan negara (UU No.17/2003, UU No.1/2004, dan UU No.15/2004) menjadi dasar dalam reformasi manajemen keuangan sektor publik yang menunjukkan komitmen pemerintah Indonesia untuk melaksanakan praktik-praktik penganggaran berbasis kinerja dan *good governance* yang berlaku secara internasional. Penerapan prinsip-prinsip *good governance* (aturan, kualitas peraturan, dan teknologi informasi) serta kompetensi instansi pemerintah dapat meningkatkan keberhasilan pelaksanaan anggaran berbasis kinerja ini (Sriharioto & Wardhani, 2012).

Nurkhamid (2008) menyatakan bahwa komitmen manajemen, pelatihan, dan budaya organisasi berpengaruh positif terhadap pengembangan sistem pengukuran kinerja, akuntabilitas kinerja, dan penggunaan informasi kinerja. Akan tetapi, terdapat beberapa hal yang menyebabkan sulitnya mengembangkan sistem pengukuran kinerja tersebut, yaitu keterbatasan sistem

informasi dan kesulitan dalam menentukan ukuran kinerja. Sementara itu, Sepkle & Verbeeten (2009) mengungkapkan bahwa penggunaan sistem pengukuran kinerja pada sektor publik di Belanda terbukti meningkatkan kinerja aparat pemerintah di negara tersebut.

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)

SAKIP merupakan gambaran kinerja suatu instansi pemerintah sebagai realisasi dari Inpres No. 7 Tahun 1999. Sebelum LAKIP disusun, instansi pemerintah perlu membuat Dokumen Penetapan Kinerja yang merupakan satu dokumen pernyataan kinerja/ kesepakatan kinerja/ perjanjian kinerja antara atasan dan bawahan untuk mewujudkan target kinerja tertentu berdasarkan pada sumber daya yang dimiliki oleh instansi yang bersangkutan. Hasil pengukuran kinerja disajikan dalam LAKIP, yang disajikan dengan sistematika sebagai berikut :

- a) Ringkasan eksekutif (*executive summary*).
- b) Bab I : Pendahuluan (berisi gambaran umum organisasi yang melaporkan dan sekilas pengantar lainnya).
- c) Bab II : Perencanaan dan Perjanjian Kinerja (berisi ikhtisar berbagai hal penting dalam perencanaan dan perjanjian kinerja yang ada dalam Dokumen Penetapan Kinerja).
- d) Bab III : Akuntabilitas Kinerja (berisi uraian pencapaian sasaran-sasaran organisasi pelapor, dengan pengungkapan dan penyajian dari hasil pengukuran kinerja).
- e) Bab IV : Penutup.

Sementara itu, dalam pasal 18 PermenPAN dan RB Nomor 29 Tahun 2010, disebutkan bahwa LAKIP dimanfaatkan oleh instansi pemerintah untuk :

- a. Bahan evaluasi akuntabilitas kinerja bagi pihak yang membutuhkan.
- b. Penyempurnaan dokumen perencanaan periode yang akan datang.
- c. Penyempurnaan pelaksanaan program dan kegiatan yang akan datang.
- d. Penyempurnaan berbagai kebijakan yang diperlukan.

Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat

Sementara itu di sisi lain, sebagai bentuk akuntabilitas dan transparansi pelaksanaan anggaran instansi yang bersangkutan dibuatlah suatu sistem pelaporan keuangan instansi pemerintah yang diamanatkan dalam Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/2007 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat (SAPP), yang telah diperbarui dengan PMK Nomor 233/PMK.05/2011. SAPP ini memberikan gambaran bagaimana fungsi Bendahara Umum Negara dan kementerian teknis dalam menyusun dokumen pertanggungjawaban anggarannya. Selain itu, SAPP juga memberikan gambaran pemisahan fungsi *ordonansering* (administrasi) pada kementerian teknis dan fungsi *comptabel* (perbendaharaan) Kementerian Keuangan. Sistem Akuntansi Pemerintahan (SAP) juga mendukung terciptanya perbaikan kualitas pelaporan dan evaluasi keuangan serta kinerja instansi pemerintah (Pamungkas & Yusuf,

2007; Nugraheni & Subaweh, 2008). Dengan dibuatnya sistem komputerisasi pada SAPP, maka pelaporan keuangan pemerintah menjadi semakin baik. Informasi keuangan yang disajikan-pun semakin transparan. Akuntabilitas pemerintah dari sisi finansial menjadi lebih baik di mata masyarakat.

Sebelum dibuatnya sistem pelaporan keuangan pemerintah dengan lahirnya ketiga paket undang-undang keuangan negara (UU No.17/2003, UU No.1/2004, dan UU No.15/2004), instansi pemerintah tidak memiliki kewajiban untuk mempertanggungjawabkan anggarannya. Sementara itu, setelah implementasi SAP dan SAKIP, maka instansi pemerintah diwajibkan untuk melaporkan apa yang sudah dipercayakan kepadanya, yaitu dengan membuat laporan keuangan dan laporan kinerja.

Sistem Informasi

Implementasi sistem informasi akuntansi akan memudahkan staf pengelola keuangan dalam melakukan pencatatan dan pembuatan berbagai laporan manajerial (Haryono, 2011). Dengan dukungan sistem informasi yang baik, maka pelaporan keuangan dan pelaporan kinerja instansi pemerintah dapat diimplementasikan dengan lebih mudah, lebih murah, dan lebih berkualitas. Sistem informasi yang baik akan mendukung pelayanan yang lebih berkualitas. Sistem *database* akan mempengaruhi konsep fundamental dari akuntansi (Adrianto, 2009), karena dengan model *database* ini maka informasi akuntansi bisa diperoleh secara *real-time* dan berdampak pada pengambilan keputusan. Sistem informasi juga harus dikembangkan secara berkelanjutan dan berkesinambungan sehingga diperoleh perbaikan atas berbagai kelemahan, kerusakan, dan biaya pengembangan yang tidak diinginkan atas sistem informasi yang sudah diterapkan organisasi (Wilkinson, *et. al.*, 2000). Selain itu pengembangan sistem informasi akuntansi juga memerlukan perencanaan sistem strategis dengan tujuan sebagai berikut (Wilkinson, *et. al.*, 2000) :

- a. Mengintegrasikan pengembangan sistem informasi dengan keseluruhan proses perencanaan organisasi.
- b. Meyakinkan bahwa proyek pengembangan sistem berjalan sesuai urutan, sehingga tercipta efisiensi atas penggunaan sumber daya organisasi.
- c. Mengetahui prioritas dalam pengembangan sistem informasi dengan menyesuaikan dengan kondisi dan permintaan atas sistem informasi tersebut.
- d. Mengelola peningkatan pada teknologi informasi yang ada, sehingga organisasi bisa mengikuti perkembangan yang dibutuhkan.

Akan tetapi, menurut Kurniawan (2006) pengembangan teknologi informasi di sektor pemerintahan masih menemui beberapa hambatan dan tantangan, sebagai berikut :

- a. Prioritas dan inisiatif pemerintah dalam mengantisipasi dan memanfaatkan kemajuan teknologi.
- b. Pengelolaan informasi, yaitu berupa kualitas dan keamanan pengelolaan informasi.

- c. Pelayanan yang diberikan pemerintah belum ditunjang oleh sistem manajemen dan proses kerja yang efektif karena kesiapan peraturan, prosedur, dan keterbatasan SDM.
- d. Belum mapannya strategi dan kurang memadainya alokasi anggaran untuk pengembangan sistem informasi.
- e. Inisiatif merupakan upaya instansi sendiri-sendiri.

Senada dengan hal itu, Setyantana (2009) menyatakan bahwa masih terdapat beberapa permasalahan dalam pengembangan sistem informasi pemerintahan di Indonesia seperti :

- a. Banyak sistem informasi pemerintahan yang dikembangkan secara terpisah-pisah dan tidak terintegrasi, bahkan banyak yang dikembangkan tidak dengan menggunakan *database* sehingga sulit diintegrasikan dengan sistem lain.
- b. Sistem yang dikembangkan dengan teknologi yang bermacam-macam seperti *Foxpro, dBase, Visual Basic, Delphi*, dan lain-lain.
- c. Diperlukan interoperabilitas antar sistem informasi pemerintahan di Indonesia (Setyantana, 2009).

Pengintegrasian dua buah sistem juga bisa dilakukan dengan cara-cara yang relatif sederhana. Misalnya dengan membuat model *interface* yang dapat menjadi jembatan antara *input, posting* data, dan laporan-laporan yang dilakukan secara otomatis dengan metode *background process* (Putra, 2008). Bahkan dengan model yang sederhana seperti *Microsoft Excel* dalam menyajikan laporan keuangan, akan mendukung pelayanan organisasi (Pamungkas & Triandi, 2007).

Bila dicermati lebih lanjut, sebenarnya kendala sistem informasi pemerintahan pada masa sekarang ini sudah relatif bisa diatasi. Kemajuan teknologi informasi di Indonesia sudah bisa mendukung terjadinya pengintegrasian kedua sistem pelaporan di atas. Bahkan sekarang hampir setiap instansi pemerintah sudah menyediakan informasi terbuka kepada masyarakat melalui situs *web*. Rencana penerapan SPAN dan SAKTI sebagai implementasi dari PP 71/2010 tentang SAP berbasis akrual yang mulai diterapkan pada tahun anggaran 2014 juga akan mendukung pendapat ini. Integrasi sistem informasi akan memberikan berbagai keuntungan seperti efisiensi, efektivitas, dan aksesibilitas (Nasrun, *et. al.*, 2012). Sementara itu, dukungan integrasi sistem ini telah ada, baik dari sisi teknologi, sumber daya manusia, maupun dana. Dengan berbagai dukungan tersebut maka proses pengintegrasian sistem akuntabilitas kinerja dan sistem pelaporan keuangan sudah seharusnya bisa segera dilaksanakan.

Integrasi SAKIP dan SAPP

Pada kenyataannya, masyarakat dewasa ini tidak hanya ingin mengetahui tentang kinerja keuangan pemerintah yang tercermin dalam laporan keuangan. Laporan keuangan hanya menyajikan informasi keuangan saja, yang mungkin bagi sebagian pihak sulit dimengerti. Sedangkan kinerja instansi pemerintah

tidak bisa dilihat hanya dari rasio-rasio keuangan saja. Dengan indikator-indikator dalam LAKIP seperti *service efforts*, *service accomplishments*, dan indikator yang menghubungkan *service efforts* dan *service accomplishments*, maka akan didapatkan pengukuran kinerja yang lebih baik (Sadjiarto, 2000). Menurut Pamungkas & Yusuf (2007), pelaksanaan sistem yang baik dan konsisten akan berdampak pada pengurangan resiko kebocoran anggaran dan sistem akuntansi pemerintah merupakan aspek pendukung pertanggungjawaban pelaksanaan tugas utama instansi pemerintah, terutama yang berkaitan dengan aspek keuangan. Di sisi lain, penyajian laporan keuangan yang relevan (tepat waktu dan lengkap) dan andal (dapat diverifikasi) masih belum terlalu berimbas pada perbaikan kualitas pelayanan publik. Hal ini antara lain disebabkan karena sistem informasi yang digunakan oleh instansi pemerintah masih belum menyediakan informasi yang relevan dan andal bagi pengambilan keputusan organisasi pemerintahan. Integrasi sistem informasi akan memberikan berbagai keuntungan seperti efisiensi, efektivitas, dan aksesibilitas (Nasrun, *et. al.*, 2012). Senada dengan hal tersebut, Cavaluzzo & Ittner (2003) menyatakan bahwa pengembangan ukuran-ukuran kinerja harus disertai dengan peningkatan akuntabilitas pelaporan, sehingga berpengaruh pada peningkatan kinerja internal dan pengambilan keputusan yang berkualitas. Powers (2009) juga menyatakan bahwa sistem pengukuran kinerja harus terkait dengan sistem perencanaan dan manajemen, sistem evaluasi, dan sistem pemeriksaan (audit).

Sebagai perbandingan, konsep dan pengaplikasian integrasi sistem akuntabilitas kinerja dan sistem pelaporan keuangan adalah yang sudah dilaksanakan di beberapa negara antara lain :

- a. Di negara bagian New South Wales di Australia dengan suatu sistem yang disebut *Service Efforts and Accomplishments* (SEA). Pelaporan dalam SEA mencakup pelaporan pencapaian kinerja (*outcomes*), sumber daya yang digunakan (*inputs*), dan efisiensi (diukur dalam biaya per unit keluaran dan hasil). Dalam hal ini, New South Wales Treasury menggunakan SEA sebagai dasar perencanaan anggarannya (Christensen & Yoshimi, 2003).
- b. Pemerintah Hokaido (Jepang) menerapkan metode *Time Assessment* dalam upaya menerapkan NPM dan memperbaiki akuntabilitas publik dan meningkatkan kualitas kinerja pemerintahannya (Christensen & Yoshimi, 2003).
- c. Di Amerika Serikat terdapat satu format Laporan Akuntabilitas berdasarkan Government and Results ACT of 1993 (GPRA). Akan tetapi laporan akuntabilitas ini sudah mencakup informasi keuangan dan informasi program (termasuk laporan keuangan yang sudah diaudit) serta ukuran-ukuran kinerja (Artely, *et. al.*, 2001 dalam Solikin, 2006; Kustiani, 2007).
- d. Di Inggris, sebagai salah satu contoh dari *performance measurement system* pada *Police Department* (PSA – *Public Service Agreement*) dan institusi sektor publiknya terbukti meningkatkan kepercayaan masyarakat dan meningkatkan kualitas pelayanan publik (Micheli, *et. al.*, 2009).

Solikin (2006) menyatakan bahwa pengintegrasian Laporan Kinerja dan Laporan Keuangan merupakan hal yang sangat penting untuk dilaksanakan karena dengan penyusunan laporan yang terpisah, berasal dari sistem yang berbeda dan tidak terkait akan menyulitkan para penyusun laporan keuangan. Dari sisi yang lain, Nurkhamid (2008) menunjukkan bahwa masih terdapat masalah dalam implementasi sistem pengukuran kinerja di setiap organisasi pemerintahan. Permasalahan tersebut dapat muncul pada tahap pengembangan sistem pengukuran kinerja maupun pada tahap penggunaan hasil dari implementasi sistem pengukuran kinerja. Widodo (2010) menjelaskan bahwa indikator-indikator dalam LAKIP tidak terlalu berhasil dalam menilai/mengevaluasi keberhasilan program dan kebijakan pemerintah. Sementara itu, Astuti (2011) mengungkapkan bahwa LAKIP dapat mendorong pemerintah menciptakan *good governance*, memberikan masukan kepada pihak-pihak yang berkepentingan (*stakeholders*) dengan pemerintah, serta meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada pemerintah dengan terwujudnya akuntabilitas kinerja. Namun demikian, pada kenyataannya kemampuan sistem pengukuran kinerja untuk meningkatkan kinerja, dan mewujudkan *good governance* masih sering dipertanyakan dan diperdebatkan.

Salah satu faktor yang juga berperan dalam mendorong kemudahan implementasi pengintegrasian kedua sistem pelaporan di atas adalah peran dari manajemen, terutama manajemen puncak. Hal ini penting, karena pelaporan keuangan dan pelaporan kinerja melibatkan beberapa pihak seperti Kementerian Keuangan, Kementerian teknis, dan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Supeno (2011) menyatakan bahwa peran manajemen dalam transparansi organisasi pemerintah adalah sangat vital dalam proses perencanaan dan pengembangan kinerja mendatang melalui *restrospective performance appraisal* atas pengelolaan sistem akuntansi instansi (SAI) secara baik dan benar.

Pengintegrasian kedua sistem pelaporan ini pada dasarnya akan dapat memberikan banyak manfaat. Evaluasi atas keberhasilan pelaksanaan program-program pemerintah tidak bisa hanya dilihat dari sisi besarnya anggaran yang terserap. Penganggaran berbasis kinerja mensyaratkan bahwa indikator-indikator keberhasilan dan prestasi kerja instansi pemerintah perlu disertai pula dengan pengukuran-pengukuran yang menyeluruh, baik pada aspek keuangan maupun non-keuangan (Mahmudi, 2010). Senada dengan hal itu, Supartini (2012) menyatakan bahwa dalam evaluasi kinerja diperlukan pula analisis efisiensi (membandingkan antara output dan input baik untuk rencana maupun realisasi). Dengan kata lain bahwa untuk menilai kinerja tidak cukup hanya menilai indikator-indikator yang bersifat non-keuangan saja tanpa memperhatikan aspek keuangan (anggaran/ dana).

Pengintegrasian sistem akuntabilitas kinerja dan sistem pelaporan keuangan diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut :

- a. Mempermudah proses penyusunan laporan. Karena diharapkan pada sistem terintegrasi tersebut, LAKIP beserta dokumen-dokumen pendukungnya disusun melalui aplikasi komputer.
- b. Adanya keterkaitan dan keterbandingan pada aspek keuangan dan non-keuangan. Dengan sistem terintegrasi, maka uraian-uraian dan indikator sasaran, program, dan kegiatan beserta indikator input, output, bahkan outcome akan bersumber pada database yang sama sehingga proses rekonsiliasi data-pun dapat dilakukan dengan lebih mudah. Selain itu diharapkan nantinya juga akan diperoleh kemudahan dalam evaluasi dan audit keuangan dan kinerja yang bisa dilakukan secara simultan dan komprehensif.
- c. Akan tercipta kesinambungan data sehingga mempermudah dalam proses perencanaan anggaran dan kinerja. Dengan menggunakan aplikasi komputer dan database terintegrasi, maka data kinerja dan keuangan setiap tahun anggaran dapat tersimpan dengan baik dan dapat digunakan sebagai dasar perencanaan. Selain itu, dengan terkomputerisasinya data-data kinerja, maka dapat diperoleh komparasi antar tahun anggaran sehingga dapat diketahui peningkatan dan perbaikan apa saja yang sudah dilakukan oleh setiap instansi pemerintahan.

III. ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Prosedur Pengintegrasian LAKIP dan SAPP

Berdasarkan uraian yang telah penulis paparkan pada bab sebelumnya, maka penulis berpendapat bahwa pengintegrasian sistem akuntabilitas kinerja dan sistem pelaporan keuangan adalah memungkinkan untuk diimplementasikan. Tujuan dari pengintegrasian kedua sistem ini adalah antara lain untuk :

- a. Memudahkan penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) – dari sebelumnya secara manual menjadi terkomputerisasi (menggunakan aplikasi komputer).
- b. Menjadikan pengukuran yang komprehensif atas kinerja non-keuangan dan kinerja keuangan instansi pemerintah.
- c. Memudahkan dalam menganalisis dan mengevaluasi keberhasilan kinerja organisasi pemerintah, terutama yang berkaitan dengan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan program dan kegiatan (misalnya dalam melihat besaran persentase realisasi anggaran dibandingkan dengan keberhasilan pencapaian *output* dan *outcome*).
- d. Membuat LAKIP menjadi lebih bermanfaat dalam perencanaan kinerja tahun anggaran mendatang, yaitu dengan menjadikan LAKIP lebih berkesinambungan dan saling terkait antar tahun anggaran.

Pengintegrasian ini juga diharapkan dapat meningkatkan kualitas pelayanan publik, yaitu dengan menambah fungsi LAKIP dalam menilai keberhasilan suatu organisasi pemerintah. Selain itu, diharapkan pada masa mendatang LAKIP tidak hanya dianggap sebagai pelengkap dan formalitas saja

karena pada dasarnya akuntabilitas kinerja adalah sama pentingnya dengan akuntabilitas keuangan.

Berikut penulis akan membuat model pengintegrasian sistem akuntabilitas kinerja dan sistem pelaporan keuangan instansi pemerintah. Pengintegrasian akan dilakukan melalui beberapa tahapan sebagai berikut :

a) Pengklasifikasian data

Tujuan dari pengklasifikasian data ini adalah untuk memilah antara data pada LAKIP yang terkait langsung dengan aspek-aspek keuangan dengan data-data yang tidak berhubungan langsung dengan aspek keuangan. Contohnya persentase realisasi anggaran, uraian *output* dan *outcome*, dan indikator kinerja utama. Ketiga hal ini muncul baik pada dokumen kinerja (RKT, PK, dan LAKIP) maupun pada dokumen penganggaran (RKA K/L, DIPA, dan Laporan Keuangan) sehingga memungkinkan untuk diintegrasikan.

b) Membuat model interkoneksi *database*

Cara ini digunakan agar dapat diketahui dan/ atau disimulasikan hubungan antar data yang sudah dikalifikasikan pada langkah pertama di atas. Selain itu, juga dapat dibuat rancangan model interkoneksi antar sistem yang diperlukan. Model yang dibuat berupa *flowchart-flowchat* yang menggambarkan interkoneksi *database* tersebut.

c) Membuat simulasi sistem terintegrasi (*input – process – output*)

Setelah interkoneksi *database* bisa dibuat/ dirancang, maka selanjutnya penulis akan menyusun model sistem terintegrasi dimaksud. Model dibuat dengan simulasi *input* (data/ uraian/ dokumen/ sistem yang diperlukan sebagai masukan), *process* (sistem yang dipergunakan untuk pengintegrasian), dan *output* (berupa dokumen/ laporan yang merupakan hasil dari sistem yang sudah terintegrasi).

d) Mengaplikasikan model pada program komputer

Pada tahap ini model-model yang sudah dibuat akan diaplikasikan pada program komputer. Akan tetapi, karena keterbatasan waktu penelitian, lingkup/ tema penelitian, dan keterbatasan pengetahuan penulis pada pemrograman komputer, maka tahap ini belum bisa dilaksanakan. Namun demikian, ketiga tahapan sebelumnya diharapkan tetap dapat menjadi acuan dan pedoman dalam merancang program/ aplikasi komputer pada masa yang akan datang.

**Tabel, Flowchart, dan Penjelasan
Klasifikasi data**

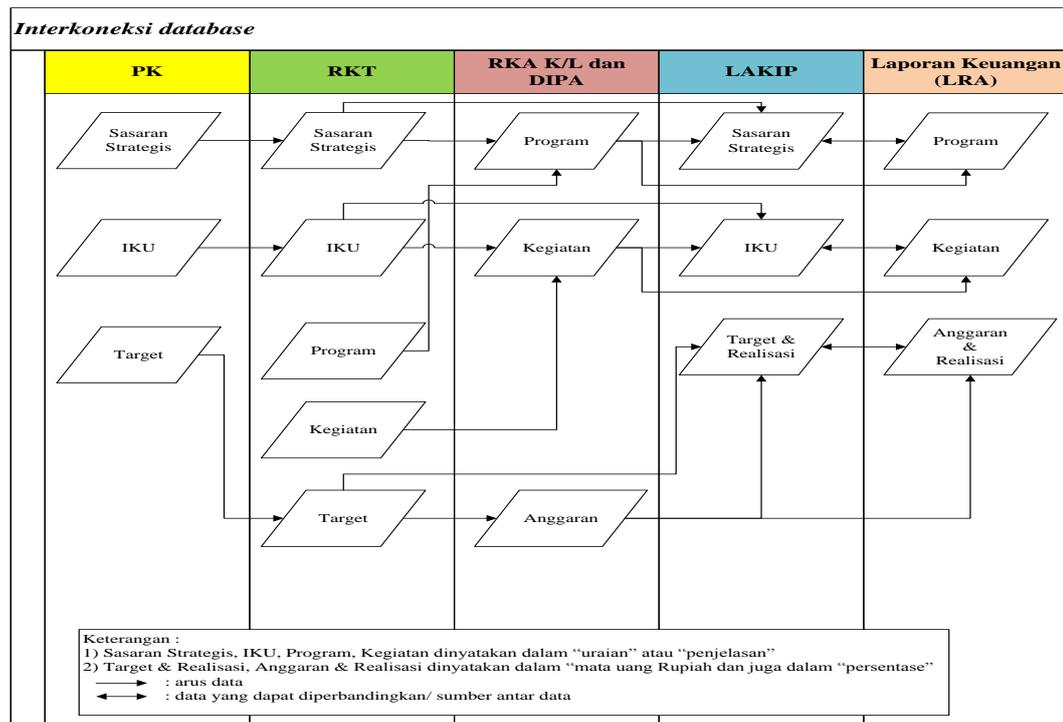
Dokumen Sumber Data	Uraian yang muncul pada :	
	LAKIP	Laporan Keuangan
PK	Sasaran Strategis, IKU, Target dan Realisasi (Rp. dan %	Sasaran Strategis = Program, IKU = Kegiatan Anggaran (Rp. dan %) dan Realisasi (Rp. dan %)
RKT	Sasaran Strategis, IKU, Program dan Kegiatan, Indikator Kinerja (<i>input, output,</i> dan <i>outcome</i>), Target dan Realisasi (Rp. dan %)	Sasaran Strategis = Program, IKU = Kegiatan Anggaran (Rp. dan %) dan Realisasi (Rp. dan %)
RKA K/L dan DIPA	Program dan Kegiatan, <i>Output</i> (Rp.)	Uraian Program/Kegiatan, Anggaran (Rp. dan %) dan Realisasi (Rp. dan %)

Sumber : data diolah

Penjelasan :

- 1) Yang menjadi dokumen sumber dalam proses pengintegrasian ini adalah Penetapan Kinerja (PK), Rencana Kegiatan Tahunan (RKT), Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/ Lembaga (RKA K/L), serta Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA).
- 2) Dokumen PK dan RKT merupakan dokumen sumber utama untuk penyusunan LAKIP.
- 3) Dokumen RKA K/L dan DIPA merupakan dokumen sumber utama untuk penyusunan Laporan Keuangan.
- 4) Uraian Sasaran Strategis pada PK, RKT, dan LAKIP akan dipersamakan (dieliminasi/dilebur) menjadi uraian Program pada RKA K/L, DIPA, dan Laporan Keuangan.
- 5) "Target" dan "Realisasi" selain dinyatakan dalam persentase, juga dinyatakan dalam angka/ nilai rupiah agar dapat diperbandingkan secara langsung dengan "Anggaran" dan "Realisasi" pada RKA K/L, DIPA, dan Laporan Keuangan (dipersamakan antara "Target" dan "Realisasi" pada PK, RKT, dan LAKIP dengan "Anggaran" dan "Realisasi" pada RKA K/L, DIPA, dan Laporan Keuangan).

Model interkoneksi database

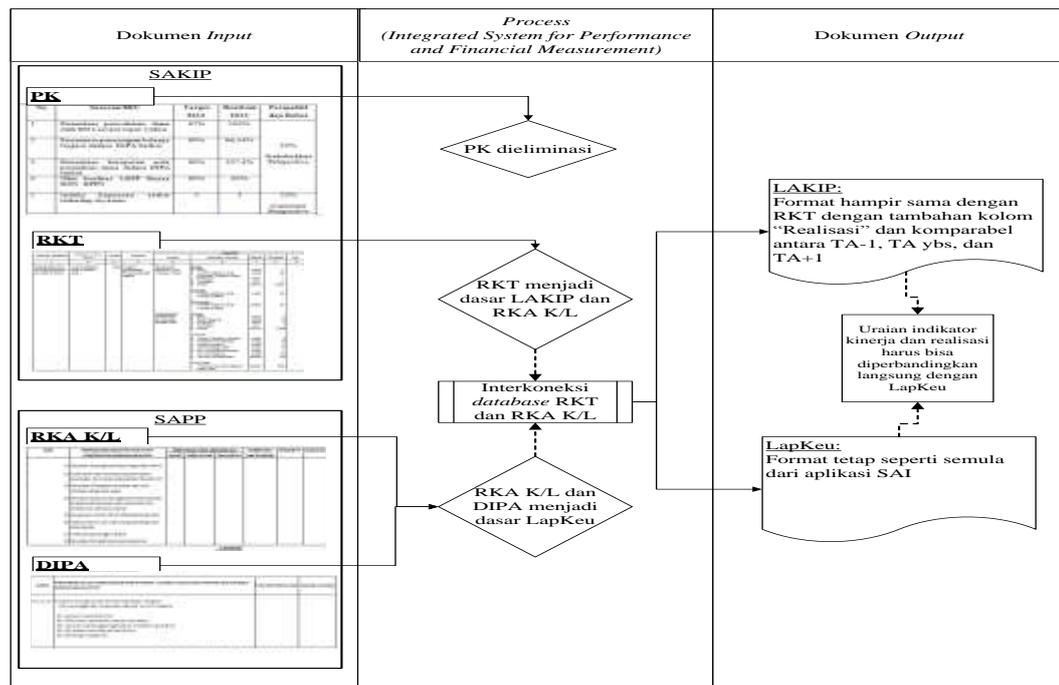


Sumber : data diolah

Penjelasan :

- 1) Interkoneksi atau keterhubungan antar *database* harus dilakukan pada dokumen-dokumen sebagai dasar penyusunan LAKIP dan Laporan Keuangan secara simultan agar tercipta arus data yang berkesinambungan dan saling terkait satu sama lain.
- 2) Arus data pada gambar di atas menunjukkan urutan penyusunan dokumen, dimana uraian-uraian pada dokumen sumber saling disesuaikan. Sementara untuk uraian/ kolom yang belum ada akan ditambahkan, baik pada dokumen sumber maupun pada dokumen *output*.
- 3) Tanda panah satu arah menunjukkan arus data mulai dari dokumen sumber sampai kepada dokumen *output*.
- 4) Tanda panah dua arah menunjukkan keterkaitan antara dua data pada laporan yang terpisah, sehingga data-data tersebut bisa diperbandingkan dan direkonsiliasi, serta bisa menjadi dasar evaluasi dan audit secara komprehensif.
- 5) Dokumen PK dan RKT akan menjadi dasar utama penyusunan LAKIP (nantinya tidak diperlukan lagi sebagai lampiran LAKIP). Sedangkan RKA K/L dan DIPA pada saat ini sudah menjadi dasar utama penyusunan Laporan Keuangan melalui sistem/ aplikasi SAI. Pada model di atas, diharapkan bahwa dokumen perencanaan kinerja juga akan selalu terkait dengan dokumen perencanaan anggaran.
- 6) Dokumen PK sebenarnya dapat dieliminasi, karena uraian-uraiannya juga hampir serupa dengan yang ada pada dokumen RKT.

Model sistem terintegrasi (*input – process – output*)



Sumber : data diolah

Gambar di atas dapat dijelaskan sebagai berikut :

- SAKIP (Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) menghasilkan dokumen berupa PK, RKT, dan LAKIP.
- SAPP (Sistem Akuntansi dan Pemerintah Pusat) menghasilkan dokumen berupa RKA K/L, DIPA, dan Laporan Keuangan.
- Dokumen Perencanaan Kinerja (PK) dapat dieliminasi, karena pada dasarnya dokumen PK yang ada sekarang tidak terlalu penting dan isinya hampir sama dengan yang ada pada dokumen RKT sehingga dengan menggunakan RKT saja sudah cukup untuk menjadi dasar penyusunan LAKIP. Selain itu, uraian dalam RKT juga lebih lengkap bila dibandingkan dengan PK.
- Sementara itu, untuk RKA K/L dan DIPA akan tetap menjadi dasar dalam penyusunan Laporan Keuangan, karena sampai dengan saat ini SAI sudah berjalan dengan baik dan relatif tidak terlalu mengalami kendala berarti dalam implementasinya.
- Pengintegrasian dilakukan dengan mengkoneksikan data-data yang ada pada RKT dan RKA K/L sebagai dokumen perencanaan kinerja dan anggaran. Dengan interkoneksi *database* ini maka diharapkan sudah terbentuk keterkaitan antar-dokumen dari dua sistem yang berbeda (SAKIP dan SAPP).
- Selanjutnya, dari interkoneksi tersebut maka dapat dihasilkan dua laporan yaitu LAKIP dan Laporan Keuangan yang sudah memuat uraian (program, kegiatan, target, realisasi, *input*, *output*, dan *outcome*) yang sama/ serupa/

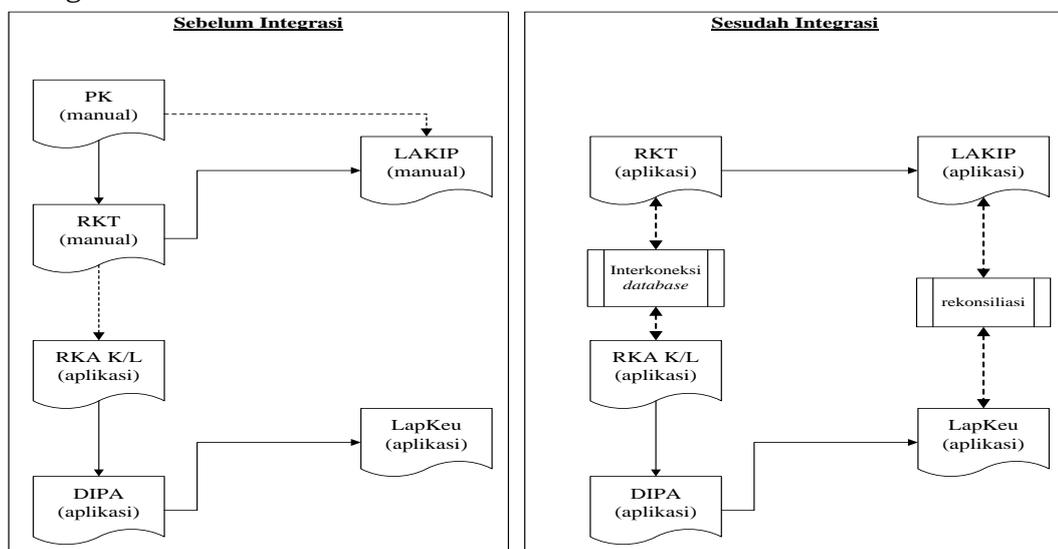
dipersamakan. Kedua laporan ini akan dapat diperbandingkan secara langsung karena berasal dari sistem yang satu/ terintegrasi.

- g) Khusus untuk LAKIP, sebaiknya juga disertakan perbandingan kinerja tahun anggaran sebelumnya (TA-1), kinerja tahun anggaran yang bersangkutan (TA 0), dan informasi target kinerja tahun anggaran mendatang (TA+1). Tujuannya adalah agar diperoleh informasi kinerja yang berkesinambungan sehingga dapat diketahui pula peningkatan kinerja organisasi pemerintah yang bersangkutan dari tahun ke tahun.
- h) Cara lainnya adalah sistem terintegrasi di atas menghasilkan satu laporan saja, yang memuat baik informasi finansial (Laporan Keuangan) maupun informasi non-finansial (LAKIP). Apabila cara ini yang dipilih, maka pada dasarnya akan lebih efisien karena prosedur evaluasi serta pemeriksaan (keuangan dan kinerja) dapat dilakukan secara langsung dan lebih komprehensif.

Informasi kinerja sebaiknya juga tidak hanya melihat efisiensi penggunaan dana, akan tetapi juga melihat dimensi proses dan dimensi waktu pencapaian sasaran dimaksud. Sebagai contoh, suatu organisasi tidak bisa dinilai efektif dan efisien apabila penyerapan anggaran <100% (= hemat) dengan mengesampingkan informasi bahwa organisasi tersebut kurang berhasil memberikan pelayanan publik yang optimal (misal dari *survey* kepuasan pelanggan diketahui bahwa pelayanan organisasi tersebut masih kurang baik). Dengan kata lain bahwa organisasi tersebut tidak bisa meningkatkan kinerjanya walaupun anggarannya bisa dihemat.

Gambaran Sistem Sebelum dan Sesudah Terintegrasi

Berdasarkan pada pembahasan pada sub-bab sebelumnya, maka penulis dapat menyajikan ringkasan perbedaan sistem akuntabilitas kinerja dan sistem pelaporan keuangan instansi pemerintah sebelum dan sesudah terintegrasi sebagai berikut :



Sumber : data diolah

Gambar di atas secara jelas menggambarkan perbedaan mekanisme penyusunan LAKIP dan Laporan Keuangan. Sebelum terintegrasi, LAKIP disusun secara manual, begitu pula dengan dokumen-dokumen pendukungnya. Sedangkan Laporan Keuangan telah dihasilkan dari aplikasi komputer. Sedangkan setelah terintegrasi, kedua laporan tersebut akan dihasilkan dari aplikasi komputer yang terintegrasi, sehingga *database* dari kedua laporan tersebut bisa dikoneksikan serta kedua laporan tersebut bisa direkonsiliasikan. Contoh format laporan terintegrasi dapat digambarkan sebagai berikut :

LAPORAN KINERJA TERINTEGRASI

Tahun Anggaran :

Kementerian/ Lembaga :
 Eselon I :
 Satuan Kerja :
 Fungsi/Subfungsi :
 Program :
 Kegiatan :
 Lokasi :

Hasil Program :

Kode	Program / Kegiatan	Belanja		Pengukuran Kinerja Tahun 20X0		Pengukuran Kinerja Tahun 20X-1		Pengukuran Kinerja TA 20X+1	Keterangan
		Anggaran	Realisasi	Rencana / Input	Realisasi / Output	Realisasi / Output	Outcome	Rencana / Input	
	Program A Kegiatan Ax Indikator Kinerja 1 Indikator Kinerja 2								

Sumber : data diolah

Gambar di atas memperlihatkan contoh format LAKIP setelah diintegrasikan dengan Laporan Keuangan. Pada kolom pagu dan realisasi, data diambil/ dikoneksikan dengan *database* pada SAI (Laporan Keuangan). Dengan demikian dapat diketahui besaran *input* yang berupa jumlah dana (aspek finansial) untuk dapat mencapai sasaran/ program/ kegiatan yang dimaksud. Maka dengan cara ini dapat diperbandingkan secara langsung aspek keuangan dan non-keuangan pada setiap program dan kegiatan instansi yang bersangkutan. Artinya bahwa didapatkan gambaran pengukuran kinerja secara komprehensif pada kedua aspek tersebut (keuangan dan non-keuangan).

Sementara itu pada berbagai tahapan penganggaran, pengintegrasian ini dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Tahapan/ Dokumen Sumber Data	Informasi yang di- <i>input</i> pada :		Pihak yang terlibat
	Aplikasi Keuangan	Aplikasi Kinerja	
Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA)	- Pagu - F/SF/P/K/O/Akun (2 digit)	- Rencana <i>Output</i> - Detail Sasaran	Satker (KPA, PPK, PPSPM, Bendahara, Operator SAI)
Petunjuk Operasional Kegiatan (POK)	- Pagu - F/SF/P/K/O/Akun - (6 digit)	- Rencana <i>Output</i> - Detail Sasaran	Satker (KPA, PPK, PPSPM, Bendahara, Operator SAI)

Surat Permintaan Pembayaran (SPP)	- Pagu, - F/SF/P/K/O/Akun (6 digit)	- <i>Input</i> (Rp.) - Target (Rp. / %) - Rencana <i>Output</i> - Detail Sasaran	Satker (KPA, PPK, PPSPM, Bendahara, Operator SAI)
Surat Perintah Membayar (SPM)	- Pagu - F/SF/P/K/O/Akun (2 digit)	- <i>Input</i> (Rp.) - Target (Rp. / %) - Rencana <i>Output</i> - Detail Sasaran	Satker (KPA, PPK, PPSPM, Bendahara, Operator SAI)
Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D)	- Pagu - F/SF/P/K/O/Akun (2 digit)	- <i>Input</i> (Rp.) - Target (Rp. / %) - Realisasi <i>Output</i> - Detail Sasaran	- KPPN - Satker (KPA, PPK, PPSPM, Pengantar SPM Bendahara, Operator SAI)
Laporan Periodik (Bulanan, Triwulanan, Semesteran, dan Tahunan)	- Pagu - SPP - SPM - SP2D	- <i>Input</i> (Rp.) - Target (Rp. / %) - Realisasi capaian Sasaran <i>Output</i> - Detail <i>Output</i> - Rencana <i>Outcome</i>	- KPPN (Vera), Satker (KPA, Operator SAI, review oleh Itjen masing2 satker) - Satker (KPA, PPK, PPSPM, Bendahara, Operator SAI) - <i>Review</i> oleh Itjen setiap satker

Sumber : data diolah

Tabel di atas menggambarkan bahwa pengintegrasian dilakukan pada semua tahapan penganggaran dan dokumen-dokumen yang terkait, mulai dari perencanaan hingga pertanggungjawaban. Dengan pengintegrasian pada semua lini, maka diharapkan akan terjadi kesinambungan dan kesesuaian data antara perencanaan dan pelaksanaan sampai kepada pelaporannya (baik untuk informasi keuangan maupun informasi kinerja). Selain itu, informasi kinerja dan keuangan dapat diketahui secara real time dan tepat waktu.

Pengisian informasi kinerja dan informasi keuangan pada kedua aplikasi dilakukan secara simultan dengan tujuan untuk memperoleh kesinambungan dan konektivitas database baik pada sisi keuangan maupun sisi kinerja. Sedangkan pada periode pelaporan, maka satuan kerja dan KPPN selaku Kuasa BUN melakukan rekonsiliasi data. Pada tahapan rekonsiliasi data ini, Laporan Kinerja Terintegrasi digunakan sebagai lampiran dalam Laporan Keuangan. Sementara untuk mekanisme penyampaian laporannya tetap mengikuti prosedur yang sudah ditetapkan oleh peraturan yang berlaku (PermenPAN & RB Nomor 29 Tahun 2010 dan PMK 171/PMK.05/2007).

Pengintegrasian ini diharapkan akan memberikan berbagai manfaat pada kedua pelaporan di atas. Berikut penulis sajikan ringkasan perubahan/perbaikan dari sistem akuntabilitas kinerja dan pelaporan keuangan yang terintegrasi :

No.	Sebelum Sistem Terintegrasi	Sesudah Sistem Terintegrasi	Perubahan/ Perbaikan yang Terjadi
1.	LAKIP disusun secara manual	LAKIP dihasilkan dari sistem terkomputerisasi	Penyusunan LAKIP menjadi lebih mudah
2.	LAKIP tidak memuat informasi keuangan	LAKIP memuat informasi keuangan (anggaran)	Ada perbandingan kinerja finansial dan non-finansial
3.	RKT dan PK dibuat secara manual	RKT dihasilkan dari aplikasi komputer, sementara PK dieliminasi	<ul style="list-style-type: none"> - Pengeliminasian PK akan mengurangi beban kerja - RKT bisa diinterkoneksi dengan RKA K/L sebagai dokumen perencanaan
4.	RKT dikaitkan dengan RKA K/L secara manual	RKT dikaitkan dengan RKA K/L secara komputerisasi	<ul style="list-style-type: none"> - Proses penyusunan RKT dan RKA K/L menjadi lebih mudah - RKT dan RKA K/L menjadi lebih terhubung
5.	LAKIP dan Laporan Keuangan dihasilkan dari metode dan sistem yang terpisah	LAKIP dan Laporan Keuangan dihasilkan dari metode dan sistem yang terintegrasi	<ul style="list-style-type: none"> - Proses penyusunan LAKIP menjadi lebih mudah - LAKIP lebih bermanfaat untuk mengevaluasi kinerja - LAKIP dan Laporan Keuangan menjadi lebih terkait satu sama lain - Evaluasi kinerja keuangan dan non-keuangan dapat dilakukan secara simultan dan komprehensif
6.	LAKIP tidak memuat komparasi antar tahun anggaran	LAKIP berisi komparasi antar tahun anggaran (TA-1, TA 0, dan TA+1)	<ul style="list-style-type: none"> - Ada kesinambungan data dan informasi kinerja - Evaluasi kinerja menjadi lebih mudah dan komprehensif
7.	Ada 2 laporan (LAKIP dan Laporan Keuangan)	<p>a. Tetap ada 2 laporan (LAKIP dan Laporan Keuangan) yang berasal dari satu sistem terintegrasi; atau</p> <p>b. Hanya ada 1 laporan terintegrasi</p>	<p>a. Evaluasi kinerja keuangan dan non-keuangan dapat dilakukan secara simultan dan komprehensif</p> <p>b. Audit kinerja dan audit keuangan dapat dilakukan secara bersamaan</p>

Sumber : data diolah

Reward and Punishment System

Implementasi suatu sistem yang baru tentu tidak akan mudah dan memerlukan banyak faktor pendukung. Pelaporan kinerja pada saat ini yang cenderung kurang diperhatikan oleh pihak-pihak terkait juga tidak bisa terlepas dari kurangnya mekanisme *reward and punishment system* dalam pelaksanaannya. Dalam PP Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan

dan Kinerja Instansi Pemerintah, tidak disebutkan sanksi apa yang akan diberikan kepada instansi pemerintah yang tidak menyusun LAKIP atau terlambat menyampaikan LAKIP. Aturan tentang sanksi hanya menyangkut keterlambatan penyampaian Laporan Keuangan (Pasal 34 PP 8/2006). Sementara itu, dalam PermenPAN dan RB Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah juga tidak menyebutkan tentang mekanisme pemberian sanksi bagi instansi pemerintah yang tidak menyusun atau terlambat menyampaikan LAKIP.

Dari uraian singkat di atas maka penulis dapat menyimpulkan bahwa salah satu penyebab kurang efektifnya pelaporan kinerja instansi pemerintah sampai dengan saat ini adalah karena belum diterapkannya mekanisme *reward and punishment system* tersebut. Dengan tidak adanya sanksi dan penghargaan, maka instansi pemerintah akan menganggap bahwa LAKIP hanya sebatas pemenuhan kewajiban formal saja. Hal ini berbeda dengan pelaporan keuangan yang sudah menerapkan mekanisme sanksi apabila satuan kerja tidak menyampaikan Laporan Keuangannya atau terlambat menyampaikan Laporan Keuangannya kepada KPPN selaku Kuasa BUN. Seperti yang disebutkan dalam UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan PP Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, bahwa instansi pemerintah dapat diberikan sanksi administratif atas berbagai pelanggaran yang dilakukan.

Pada sub-bab ini, penulis akan membuat rancangan mekanisme pemberian sanksi dan penghargaan kepada instansi penyusun LAKIP agar diperoleh kepatuhan dan motivasi terutama dari pimpinan organisasi pemerintah dalam proses penyusunan dan penyampaian LAKIP yang baik dan benar. Pembahasan pada uraian ini hanya akan dibatasi pada prosedur penyampaian LAKIP, karena untuk prosedur penyampaian Laporan Keuangan pada praktiknya sudah diberikan sanksi administratif seperti penundaan pencairan dana, pemberian tanda bintang (*) atau blokir pada DIPA satuan kerja yang terlambat menyampaikan/ merekonsiliasi Laporan Keuangannya dengan KPPN selaku Kuasa BUN. Berikut adalah tabel rancangan mekanisme *reward and punishment system* untuk penyampaian LAKIP :

No.	Level LAKIP	Periode Laporan	Aturan	Reward	Punishment
1.	K/L	a. Tahunan b. Semesteran	a. 3 bulan b. 2 bulan	a. Tambahan anggaran untuk program yang berkinerja baik dan meningkat b. Publikasi keberhasilan program K/L	a. Blokir untuk program yang gagal/ realisasi <i>output/ outcome</i> -nya kurang dari 80% b. Blokir untuk program yang

					realisasi-nya kurang dari 60%
					c. Pergantian pejabat
2.	Eselon I dan Unit Kerja Mandiri	a. Tahunan b. Semesteran	a. 45 hari b. 1 bulan	a. Tambahan alokasi anggaran b. Publikasi dan piagam c. Promosi jabatan	a. Pengurangan alokasi anggaran b. Blokir c. Pergantian pejabat
3.	Eselon II dan Satuan Kerja	a. Tahunan b. Semesteran c. Triwulanan	a. 1 bulan b. 1 bulan c. 15 hari	a. Tambahan alokasi anggaran b. Publikasi dan piagam c. Promosi jabatan	a. Pengurangan alokasi anggaran b. Blokir c. Pergantian pejabat
4.	Provinsi / Kab./ Kota	a. Tahunan b. Semesteran	a. 3 bulan b. 2 bulan	a. Tambahan dana perimbangan b. Publikasi dan piagam	a. Pengurangan dana perimbangan b. Blokir dana perimbangan
5.	SKPD dan Unit Kerja Mandiri	a. Tahunan b. Semesteran c. Triwulanan	a. 1 bulan b. 1 bulan c. 15 hari	a. Tambahan alokasi anggaran b. Publikasi dan piagam c. Promosi jabatan	a. Pengurangan alokasi anggaran b. Blokir c. Pergantian pejabat

Sumber : data diolah

Sebagai catatan penting atas penerapan mekanisme sanksi dan penghargaan di atas adalah adanya pendukung berupa aturan hukum yang jelas dan tegas yang mengatur pemberian penghargaan dan sanksi pada prosedur penyampaian LAKIP instansi pemerintah. Sanksi dan penghargaan yang bersifat non-administratif dimaksudkan agar setiap pejabat pemerintahan memiliki tanggungjawab dan motivasi yang besar akan keberhasilan program dan perbaikan kinerja instansinya. Usulan sanksi berupa pergantian pejabat dapat dilaksanakan karena sebelum seseorang memangku jabatan akan dilakukan penandatanganan kontrak kinerja. Dalam kontrak kinerja harus dijelaskan secara *detail* kondisi dan prasyarat bagi pemberlakuan sanksi dan penghargaan kepada setiap pejabat pemerintahan. Pemberian sanksi pada *level* manajer (pejabat) adalah dianggap penting karena pada *level* inilah tanggungjawab pekerjaan yang sesungguhnya.

Kendala dan Pendukung

Penyatuan dua atau lebih sistem dengan fungsi yang relatif berbeda memang terkesan sulit untuk dilakukan. Akan tetapi, tidak berarti bahwa hal ini tidak mungkin untuk diterapkan. Dengan berbagai dukungan yang ada pada saat ini seperti program komputer (ICT) yang lebih maju, sumber daya manusia yang sudah lebih berkualitas, serta dukungan dana maka pengembangan sistem terintegrasi tersebut akan lebih mudah untuk dirancang dan diimplementasikan. Pengintegrasian sistem akuntabilitas kinerja dan sistem pelaporan keuangan instansi pemerintah tentu saja diharapkan akan memberikan manfaat bagi peningkatan kualitas pelayanan publik di Indonesia.

Akan tetapi, atas dasar beberapa uraian dan pembahasan di atas maka penulis menganggap masih terdapat beberapa kendala dan permasalahan dalam upaya merancang dan mengimplementasikan sistem terintegrasi tersebut, diantaranya :

- a. Adanya stigma dan cara pandang (*mindset*) bahwa LAKIP tidak terlalu penting, hanya menambah beban kerja, dan dianggap sebagai formalitas. Merubah cara pandang seseorang terhadap sesuatu hal yang relatif baru memang sulit. Perubahan *mindset* juga membutuhkan jangka waktu yang tidak sebentar.
- b. Masih kurangnya kepedulian jajaran pimpinan instansi pemerintah bahwa LAKIP dan Laporan Keuangan adalah sama pentingnya. Pimpinan atau manajer akan selalu memiliki peran penting akan kebijakan organisasi. Dengan keterbatasan pengetahuan dan kepedulian pimpinan organisasi pada suatu permasalahan, maka kinerja organisasi juga relatif akan terhambat.
- c. Sistem akuntabilitas kinerja selama ini masih kurang optimal. LAKIP masih dianggap kurang penting, hanya formalitas, dan pada saat disampaikan kepada instansi vertikal yang lebih tinggi pada umumnya hanya ditumpuk, tidak diperhatikan, dan hanya sebagai penggugur kewajiban.
- d. LAKIP juga masih belum bisa menggambarkan perbaikan dan peningkatan kinerja instansi pemerintah. Hal ini dikarenakan berbagai stigma di atas serta informasi di dalam LAKIP yang kurang akurat karena dibuat secara manual. Dengan demikian maka hal yang dikhawatirkan adalah pada saat nantinya LAKIP sudah terintegrasi dengan Laporan Keuangan, masih saja stigma tersebut berlaku, walaupun sebenarnya sudah ada peningkatan fungsi dan informasi di dalam LAKIP itu sendiri.
- e. Beberapa indikator kinerja pada LAKIP masih bersifat abstrak. Maksudnya, indikator-indikator *outcome* seperti misalnya “indeks kepuasan pelanggan” masih relatif sulit diukur secara pasti dan memerlukan jangka waktu yang panjang untuk mengetahuinya. Selain itu, uraian “Target” yang tidak bersifat eksakta (angka-angka/ nilai rupiah), juga relatif rawan dengan *moral hazard* (misal target ditentukan secara asal-asalan).
- f. Interkoneksi *database* terkadang juga menjadi masalah yang cukup sulit dilakukan. Salah satu sistem yang sudah mumpuni dan sudah beroperasi

cukup lama, maka ada kemungkinan pihak pengembang sistem tersebut tidak mau untuk dicampuri dengan *database* dan sistem yang berbeda.

- g. Aspek hukum dan peraturan perundang-undangan juga bisa menjadi kendala tersendiri dalam pengintegrasian kedua sistem ini. Kendala waktu dalam merancang dan menatapkan aturan hukum sebagai dasar kebijakan pemerintah masih selalu menjadi kendala yang relatif berarti.
- h. Adanya perbedaan kepentingan (seperti halnya dalam teori agensi) pada pelaporan kinerja (LAKIP) yang dilaporkan kepada KemenPAN dan RB serta pelaporan keuangan yang disampaikan kepada Kementerian Keuangan juga bisa menjadi kendala pengimplementasian sistem terintegrasi tersebut.

Sementara faktor pendukung dalam upaya pengintegrasian kedua sistem di atas adalah :

- a. Sumber Daya Manusia di KPPN secara umum sudah lebih baik dan lebih berkualitas. Hal ini didukung dengan adanya program pendidikan dan pelatihan bagi para pegawai KPPN, terutama yang berkaitan dengan pelaporan keuangan dan aplikasi-aplikasi komputer terkait. Selain itu, dengan adanya fungsi *supervisor* pada KPPN serta *programmer* pada Direktorat Transformasi Perbendaharaan DJPBN, yang notabene mahir dan menguasai pemrograman komputer, maka akan sangat membantu dalam merancang sistem/ aplikasi komputer terintegrasi tersebut.
- b. Dukungan teknologi informasi dan komputer pada masa sekarang ini yang sudah mumpuni. Dengan semakin berkembangnya teknologi komputer, maka berbagai aplikasi dapat relatif mudah dirancang dan dibuat.
- c. Akan segera diimplementasikannya aplikasi Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara (SPAN) dan Sistem Akuntansi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI) yang berbasis pada akuntansi akrual seperti diamanatkan dalam PP Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Kedua aplikasi ini akan menggunakan *single database* sehingga proses penganggaran mulai dari perencanaan hingga pelaporan akan mengacu pada *database* yang sama sehingga diharapkan akan memberikan manfaat berupa (<http://www.span.depkeu.go.id>) :
 - Menghasilkan informasi keuangan yang lebih berkualitas.
 - Menghasilkan pengukuran kinerja yang lebih baik dan terintegrasi.
 - Memfasilitasi manajemen keuangan/ aset yang lebih transparan dan akuntabel.

IV. KESIMPULAN

Kesimpulan

Berdasarkan analisis data dan pembahasan pada bab sebelumnya, maka penulis dapat membuat kesimpulan sesuai dengan tujuan penelitian sebagai berikut :

- a. Masih terdapat beberapa permasalahan dalam implementasi sistem pelaporan kinerja dan sistem pelaporan keuangan yang terpisah, seperti :

- Pelaporan kinerja (LAKIP) hanya dianggap sebagai formalitas, sehingga belum bisa memberikan *feedback* yang optimal bagi perbaikan kualitas pelayanan publik dan peningkatan produktivitas pegawai.
 - Penyusunan LAKIP yang dilakukan secara manual akan mempersulit serta memperlama proses pelaporan kinerja instansi pemerintah.
 - Masih banyak instansi pemerintah yang lebih mengutamakan opini WTP atas Laporan Keuangannya, padahal opini WTP tidak selalu menggambarkan perbaikan/ peningkatan *performance* organisasi pemerintah secara keseluruhan. Hal ini disebabkan karena orientasi akuntabilitas instansi pemerintah saat ini masih sebatas pada aspek keuangan berupa penyerapan anggaran.
- b. Sudah ada keterkaitan antara LAKIP dan Laporan Keuangan, yaitu pada dokumen-dokumen Penetapan Kinerja (PK) dengan Rencana Kegiatan Tahunan (RKT) terutama yang berhubungan dengan Indikator Kinerja Utama (IKU) serta RKT dengan RKA K/L. Akan tetapi pengaitan tersebut masih dilakukan secara manual dan belum optimal karena LAKIP sendiri masih belum digunakan sebagaimana mestinya sebagai salah satu dokumen evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan instansi pemerintah.
- c. LAKIP dan Laporan Keuangan masih merupakan dua produk dari sistem yang terpisah. Hal ini menyebabkan belum adanya evaluasi secara simultan dan komprehensif pada kedua laporan tersebut. Perbandingan antara aspek finansial (dalam Laporan Keuangan) dan aspek non-finansial (dalam LAKIP) seharusnya bisa dilakukan secara bersamaan, karena pada dasarnya kedua aspek dalam laporan tersebut saling terkait.
- d. Pengintegrasian sistem akuntabilitas kinerja dan sistem pelaporan keuangan instansi pemerintah memungkinkan untuk dilaksanakan dengan beberapa rancangan dan simulasi prosedur teknis pengintegrasian. Alasannya sebagai berikut :
- Urgensi dari LAKIP sebagai dokumen penilaian kinerja yang seharusnya selalu terkait dengan Laporan Keuangan, agar di masa mendatang LAKIP tidak lagi dianggap sebagai formalitas saja dan dapat memberikan *feedback* bagi perbaikan kinerja dan kualitas pelayanan publik dari instansi pemerintah.
 - Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) pada Laporan Keuangan instansi pemerintah tidak selalu menggambarkan kinerja yang baik atau pelayanan publik yang berkualitas pada instansi yang bersangkutan, sedangkan LAKIP masih belum menggambarkan perbaikan kinerja secara berkesinambungan.

Saran

Dari hasil penelitian yang telah dilakukan, menurut penulis terdapat beberapa hal yang perlu direkomendasikan sebagai berikut :

- a. Semua pihak yang terlibat dalam pelaporan keuangan dan pelaporan kinerja seharusnya memberikan perhatian yang lebih serius, terutama dalam pelaporan akuntabilitas kinerja yang selama ini masih dianggap sebagai

formalitas saja. Padahal kedua pelaporan ini sama pentingnya dalam evaluasi keberhasilan program dan kegiatan organisasi pemerintah.

- b. Di masa mendatang diharapkan LAKIP dan Laporan Keuangan dapat menjadi acuan dalam peningkatan kualitas pelayanan publik, karena selama ini masih terdapat anggapan bahwa organisasi pemerintah yang mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) pada Laporan Keuangannya adalah organisasi yang telah memberikan pelayanan terbaik, walaupun mungkin pada kenyataannya hal itu tidak menggambarkan kinerja organisasi tersebut secara keseluruhan. Selain itu, pada masa mendatang diharapkan LAKIP dan Laporan Keuangan dapat secara bersama-sama memberikan *feedback* dan menjadi acuan dalam perencanaan program dan kegiatan instansi pemerintah sehingga tercipta peningkatan peran instansi pemerintah dalam memberikan pelayanan publik yang berkualitas.
- c. Kepada pihak-pihak terkait diharapkan dapat segera merancang dan mengimplementasikan sistem akuntabilitas kinerja dan sistem pelaporan keuangan instansi pemerintah yang terintegrasi seperti yang telah diamanatkan dalam peraturan perundang-undangan.
- d. Kepada peneliti selanjutnya diharapkan melengkapi penelitian sejenis dengan hal-hal sebagai berikut :
 - 1) Peneliti selanjutnya diharapkan dapat melengkapi dengan pengetahuan yang lebih mendalam tentang pemrograman komputer agar diperoleh gambaran yang lebih jelas akan prosedur pengintegrasian sistem akuntabilitas kinerja dan sistem pelaporan keuangan instansi pemerintah beserta rancangan sistem/ aplikasi komputernya.
 - 2) Peneliti selanjutnya diharapkan dapat memperluas objek penelitian, baik pada instansi pemerintah sebagai tempat melakukan penelitian maupun pada dokumen-dokumen yang akan dianalisis. Dengan *sample* yang lebih banyak maka diharapkan dapat diperoleh informasi dan pemahaman yang lebih baik dan lebih objektif.

DAFTAR PUSTAKA

- Adrianto, Zaldy. 2009. Kualitas *DatabaseModelling* dengan Konsep Ontology dalam Pemodelan Sistem Informasi Akuntansi. *Working Paper*. Universitas Padjadjaran
- AntaraneWS. 2012. Kopel: Predikat WTP Sulsel Bukan Jaminan Bebas Korupsi. (Online). (<http://makassar.antaraneWS.com>), edisi 12 Oktober, diakses 15 Maret 2013
- Arfianti, Dita. 2011. Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Nilai Informasi Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di Kabupaten Batang). *Skripsi*. Semarang: Program Sarjana Fakultas Ekonomi Universitas Diponegoro

- Cavaluzzo, K.S. & Ittner, C.D.. 2003. *Implementing Measurement Innovations: Evidence From Government. Working Paper*. Georgetown University and University of Pennsylvania
- Christensen, M. & Yoshimi, H.. 2003. *Public Sector Performance Reporting: New Public Management and Contingency Theory Insights*. *Government Auditing Review*, Volume 10
- Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan RI. (<http://www.perbendaharaan.go.id>), diakses 8 Maret 2013
- Jawa Pos. 2012. Fenomena Paradoksial Dalam Evaluasi Akuntabilitas Belanja Negara: Opini BPK Membaik. (Online). (<http://www.jawapos.co.id>), edisi 29 Desember, diakses 11 Maret 2013
- Haryono, Kholid. 2011. Pengembangan Sistem Informasi Akuntansi Daerah yang Berorientasi pada Kemandirian Audit. *Seminar Nasional Aplikasi Teknologi Informasi 2011*. Yogyakarta, 17-18 Juni 2011
- Kaplan, R.S.. 2010. *Conceptual Foundations of the Balanced Scorecard. Working Paper*. Harvard Business School, Harvard University. 10-074
- Kurniawan, Teguh. 2006. Hambatan dan Tantangan dalam Mewujudkan *Good Governance* Melalui Penerapan *E-Government* di Indonesia. *Konferensi Nasional Sistem Informasi 2006 Jurusan Teknologi Informasi Universitas Pasundan dan ITB*. Bandung. 18 Februari 2006
- Leruth, L. & Paul, E. 2007. *A Principal-Agent Theory Approach to Public Expenditure Management Systems in Developing Countries*. *OECD Journal on Budgeting*. Volume 7, Nomor 3
- Mahmudi. 2010. *Manajemen Kinerja Sektor Publik*. Edisi Kedua. Yogyakarta: UPP STIM YKPN
- Mahsun, Mohammad. 2006. *Pengukuran Kinerja Sektor Publik*. Edisi Pertama. Yogyakarta: BPFU Universitas Gadjah Mada
- Mardiasmo. 2003. *Perwujudan Transaparansi dan Akuntabilitas Publik Melalui Akuntansi Sektor Publik: Suatu Sarana Good Governance*. Disajikan dalam Pidato Pengukuhan Jabatan Guru Besar pada Fakultas Ekonomi Universitas Gadjah Mada. Yogyakarta, 29 September
- Micheli, Pietro. *et. al.*. 2009. *The Roles of Performance Measurement in English Public Sector*. UK. Centre for Business Performance, Cranfield School of Management; MK43 0AL
- Nasrun, *et. al.*. 2012. Urgensi Integrasi Sistem Informasi Akuntansi Instansi Pemerintah. *Jurnal Teknik ITS*. (Online). (<http://www.ejurnal.its.ac.id>), diakses 15 Maret 2013
- Nugraheni, P. & Subaweh, I.. 2008. Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Terhadap Kualitas Laporan Keuangan. *Jurnal Ekonomi Bisnis*, Volume 13, Nomor 1
- Nurdiawan, D & Hertianti, A. 2011. *Akuntansi Sektor Publik*. Jakarta. Salemba Empat
- Nurkhamid, Muh. 2008. Implementasi Inovasi Sistem Pengukuran Kinerja Instansi Pemerintah. *Jurnal Akuntansi Pemerintah*. Volume 3, Nomor 1; Hal. 45-76

- Pamungkas, B. & Triandi. 2007. Telaahan Penerapan Sistem Informasi Akuntansi Berbasis Komputer Akuntansi. *Jurnal Ilmiah Kesatuan*. Volume 9, Nomor 2
- Pamungkas, B. & Yusuf, E.S.. 2007. Penerapan Sistem Akuntansi Pemerintah Dalam Mendukung Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP): Penerapannya pada Pusat Analisis Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian, Bogor. *Jurnal Ilmiah Ranggagading*, Volume 7, Nomor 1
- Pamungkas, Bambang. 2012. Pengaruh Penerapan Akuntansi Sektor Publik dan Pengawasan Terhadap Kualitas Laporan Keuangan dan Implikasinya Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. *Jurnal Ilmiah Ranggagading*. Volume 12, Nomor 2: 82-93
- Powers, L.C.. 2009. *A Framework for Evaluating the Effectiveness of Performance Measurement Systems*. (Online) Realworld Systems Research Series 2009:1. (<http://ssrn.com/abstract=1371158>), diakses 8 Maret 2013
- Puslitbang Sistem Informasi dan Otomasi Administrasi Negara. 2013. (<http://psioan.lan.go.id>), diakses 3 Maret 2013
- Putra, R.S.D. 2008. Integrasi Aplikasi JL-Indo Dengan Aplikasi GL-Link Untuk Posting Otomatis Slip pada PT. Asuransi Jiwasraya (Persero). *Working Paper*. Universitas Gunadarma
- Sadjiarto, Arja. 2000. Akuntabilitas dan Pengukuran Kinerja Pemerintahan. *Jurnal Akuntansi & Keuangan*. Volume 2, Nomor 2: 138-150
- Salim, Agus. 2006. Teori & Paradigma Penelitian Sosial. Edisi Kedua. Yogyakarta: Tiara Wacana
- Setiawan, Wahyu. 2012. Pengaruh Akuntabilitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Terhadap Tingkat Korupsi Pemerintah Daerah di Indonesia. *Skripsi*. Semarang: Program Sarjana Fakultas Ekonomi Universitas Diponegoro
- Setyantana, Panca. 2009. Interoperabilitas Sistem Informasi. (Online). (<http://www.depkominfo.go.id>), diakses 28 Februari 2013
- Siregar, R.S.. 2012. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Pertimbangan Opini Auditor atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta. *Accounting Analysis Journal*. (Online). (<http://journal.unnes.ac.id/sju/index.php/aaaj>), diakses 11 Maret 2013
- Solikin. 2006. Penggabungan Laporan Keuangan dan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah: Perkembangan dan Permasalahan. *Jurnal Akuntansi Pemerintah*. Volume 2, Nomor 2, November 2006; Hal. 1-15
- Spekle, R.F. & Verbeeten, F.H.M.. 2009. *The Use of Performance Measurement Systems in Public Sector: Effects on Performance*. (Online). (<http://ssrn.com/abstract=1162242>), diakses 8 Maret 2013
- Sriharioto & Wardhani, R.. 2012. *Good Governance*, Kompetensi dan Persepsi Keberhasilan Pelaksanaan Penganggaran Berbasis Kinerja Satuan Kerja Kementerian/Lembaga. *Paper*. Dipresentasikan dalam Simposium Nasional Akuntansi XV. Banjarmasin, 20-23 September
- Sugiyono. 2012. Memahami Penelitian Kualitatif. Cetakan Ketujuh. Bandung: Alfabeta

- Sumaryantyo. 2008. Pelayanan Publik yang Berpihak pada Kesejahteraan Rakyat. *Jurnal Akuntansi dan Sistem Teknologi Informasi*. Volume 6, Nomor1; 72-78
- Supartini, Nunik. 2012. Evaluasi Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) (Studi Kasus pada Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat). Tesis. Yogyakarta: Program Magister Akuntansi Universitas Gadjah Mada
- Supeno, Hardi. 2011. Pengaruh Partisipasi Manajemen Terhadap Kepatuhan, Kebenaran Laporan, Transparansi, dan Akuntabilitas Melalui Akuntansi Instansi (Studi pada Instansi Perguruan Tinggi Negeri dan Lembaga/Unit Pemerintah Wilayah Jawa Timur). *Majalah Ekonomi*, Tahun XXI, Nomor 2
- Tome, A.H.. 2012. Reformasi Birokrasi Dalam Rangka Mewujudkan *Good Governance* Ditinjau dari Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 20 Tahun 2010. (Online). (<http://repo.unsrat.ac.id>), diakses 15 Maret 2013
- Widodo, Joko. 2010. *Policy Implementation of Governmental Institution Performance Accountability (AKIP) that is Embodied in the Report of Governmental Institution Accountability (LAKIP)*. *Jurnal Aplikasi Manajemen*, Volume 8, Nomor 4, November 2010
- Wilkinson, J.W. et. al. 2000. *Accounting Information Systems*. 4th Edition. USA: John Wiley & Sons, Inc.
- Yamamoto, Hiromi. 2003. *New Public Management – Japan’s Practice*. IIPS Policy Paper. Institute for International Policy Studies. 293E
- Yuliani, Sri. Mewujudkan Birokrasi yang Pro-Citizen (*Review Paradigma New Public Service*). *Jurnal Ilmu Administrasi FISIP UNS*. Volume 3, Nomor 1
- Yuwono, Sony. 2001. *Balanced Scor Card: Menuju Organisasi yang Fokus Terhadap Strategi*. *Jurnal Akuntabilitas*, Volume 1, Nomor 1; 38-50. Universitas Pancasila
- Zeyn, Elvyra. 2011. Pengaruh *Good Governance* dan Standar Akuntansi Pemerintahan Terhadap Akuntabilitas Keuangan dengan Komitmen Organisasi Sebagai Pemoderasi. *Jurnal Reviu Akuntansi dan Keuangan*. Volume 1, Nomor 1; Pp 21-37
- _____. Instruksi Presiden RI Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
- _____. Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara RI Nomor 239/IX/6/8/2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
- _____. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 12/KMK.01/2010 tentang Pengelolaan Kinerja di Lingkungan Kementerian Keuangan
- _____. Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 112/PMK.02/2012 tentang Petunjuk Penyusunan dan Penelaahan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/ Lembaga
- _____. Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 160/PMK.02/2012 tentang Petunjuk Penyusunan dan Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran

- ___ . Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 169/PMK.01/2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Perbendaharaan
- ___ . Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 171/PMK.05/2007 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat
- ___ . Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 233/PMK.05/2011 tentang Perubahan Atas PMK Nomor 171/PMK.05/2007 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat
- ___ . Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
- ___ . Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara RI Nomor PER/09/M. PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah
- ___ . Peraturan Pemerintah RI Nomor 71 Tahun 2010 tentang Sistem Akuntansi Pemerintahan
- ___ . Peraturan Pemerintah RI Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah
- ___ . Peraturan Pemerintah RI Nomor 90 Tahun 2010 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/ Lembaga
- ___ . TAP MPR RI Nomor XI/MPR/1998 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme
- ___ . Undang-undang RI Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara
- ___ . Undang-undang RI Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara
- ___ . Undang-undang RI Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
- ___ . Undang-undang RI Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme